



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dengan birokrasi pemerintah yang profesional dan berintegritas tinggi sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
- b. bahwa dengan telah ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 yang menyatakan *Road Map* yang berisikan kegiatan di level mikro disusun dan dilaksanakan oleh Tim Reformasi Birokrasi;
- c. bahwa untuk pelaksanaan dan evaluasi reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta, perlu dikoordinasikan oleh Tim Reformasi Birokrasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan

Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1531 Tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Administrasi di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA.

- KESATU : Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta.
- KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi dan Tugas-tugas Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU di atas, perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 3 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA,

ttd.

NOOR HARSYA ARYOSAMODRO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



LIA EKAWATI AGUSTINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA

SUSUNAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1. TIM PENGARAH				
1.	Noor Harsya Aryosamodro	Ketua	Pengarah merangkap Ketua	1. Memberikan arahan dalam penyusunan kegiatan Reformasi Birokrasi. 2. Menerima Laporan dari Tim Pelaksana dan Agen Perubahan. 3. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi tetap berjalan konsisten, terarah dan berkelanjutan.
2.	Erizal	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	
3.	Agus Muhamad Yasin	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	
4.	Ratna Mustika Sari	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	
5.	Zuhad Najamuddin	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	
2. TIM PELAKSANA				
1.	Srimulyani	Sekretaris	Ketua	1. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja dan jadwal kegiatan Reformasi Birokrasi. 2. Mengkoordinasikan pelaksanaan dan kegiatan Reformasi Perubahan. 3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan Reformasi Perubahan.
2.	Luky Anggraeni	Kepala Sub. Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Sekretaris	

				<p>4. Membimbing, mengawal dan mengkoordinasikan penyusunan Laporan Reformasi Birokrasi.</p> <p>5. Membuat laporan pelaksanaan pelaksanaan Reformasi Birokrasi.</p>
a). TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1.	Rahadiana Puji A' Yuni	Kepala Sub. Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta; - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi;
2.	Lia Ekawati Agustina	Plt. Kepala Sub. Bagian. Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota	
3.	Kholil Ar Rahman	Plt. Kepala Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	
4.	Luky Anggraeni	Kepala Sub. Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
b). TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN DEREGULASI KEBIJAKAN				
1.	Kholil Ar Rahman	Plt. Kepala Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta; - Melaksanakan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau
2.	Lia Ekawati Agustina	Plt. Kepala Sub. Bagian. Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Asesor	
3.	Lisa Kadarwati	Penyusun Bahan	Anggota	

		Penyuluhan Hukum		tidak sinkron di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta;
4.	Wenny Amalia	Analisis Penegakan Integritas dan Disiplin Sumber Daya Manusia Aparatur	Anggota	
5.	Didik Sutrianto	Analisis Penghubung Antar Lembaga	Anggota	
c). TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN				
1.	Lia Ekawati Agustina	Plt. Kepala Sub. Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	- Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi;
2.	Kholil Ar Rahman	Plt. Kepala Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Asesor	
3.	Wenny Amalia	Analisis Penegakan Integritas dan Disiplin Sumber Daya Manusia Aparatur	Anggota	
4.	Lisa Kadarwati	Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum		
5.	Muh. Heri Suryono	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi	Anggota	
d). TIM PENATAAN TATA LAKSANA				
1.	Luky Anggraeni	Kepala Sub. Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	- Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i> ; - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>egoverment</i> ;
2.	Rahadiana Puji A' Yuni	Kepala Sub. Bagian Keuangan,	Asesor	

		Umum dan Logistik		
3.	Sinta Citra Cahyani	Analisis Data dan Informasi	Anggota	
4.	Sriyanto	Analisis Pemilu	Anggota	
5.	Lindha Asrie Ati Muktie	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Anggota	
6.	Ferdina Nur Banar	PPNPN Bidang Administrasi	Anggota	
e). TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA				
1.	Lia Ekawati Agustina	Plt. Kepala Sub. Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksanakan system rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi;
2.	Kholil Ar Rahman	Plt. Kepala Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Asesor	- Melakukan <i>assesment</i> individu berdasarkan kompetensi;
3.	Wenny Amalia	Analisis Penegakan Integritas dan Disiplin Sumber Daya Manusia Aparatur	Anggota	- Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu;
4.	Bagus Dwi Saputro	Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan	Anggota	- Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik;
5.	Putri Nastiti	Analisis Laporan Keuangan	Anggota	
6.	Sriyanto	Analisis Pemilu	Anggota	
f). TIM PENGAWASAN				
1.	Kholil Ar Rahman	Plt. Kepala Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
2.	Luky Anggraeni	Kepala Sub. Bagian Perencanaan,	Asesor	

		Data dan Informasi		- Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan Consulting;
3.	Lisa Kadarwati	Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum	Anggota	
4.	Didik Sutrianto	Analisis Penghubung Antar Lembaga	Anggota	
5.	Sriyanto	Analisis Pemilu	Anggota	
6.	Suci Astuti Handayani	Penyusun Laporan Keuangan	Anggota	
7.	Bagus Dwi Saputro	Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan	Anggota	
8.	Setyawan Isharyadi	Penyusun Laporan Keuangan	Anggota	
g. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA				
1.	Luky Anggraeni	Kepala Sub. Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur; - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta;
2.	Lia Ekawati Agustina	Plt. Kepala Sub. Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Asesor	
3.	Wenny Amalia	Analisis Penegakan Integritas dan Disiplin Sumber Daya Manusia Aparatur	Anggota	
4.	Sinta Citra Cahyani	Analisis Data dan Informasi	Anggota	
5.	Setyawan Isharyadi	Penyusun Laporan Keuangan	Anggota	
6.	Putri Nastiti	Analisis Laporan Keuangan	Anggota	

7.	Lindha Asrie Ati Muktie	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Anggota	
h). TIM PELAYANAN PUBLIK				
1.	Rahadiana Puji A' Yuni	Kepala Sub.Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik; - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
2.	Luky Anggraeni	Kepala Sub. Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Asesor	
3.	Didik Sutrianto	Analisis Penghubung Antar Lembaga	Anggota	
4.	Wenny Amalia	Analisis Penegakan Integritas dan Disiplin Sumber Daya Manusia Aparatur	Wenny Amalia	
5.	Lisa Kadarwati	Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum	Anggota	
6.	Sriyanto	Analisis Pemilu	Anggota	
7.	Muh. Heri Suryono	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi	Anggota	
8.	Sinta Citra Cahyani	Analisis Data dan Informasi	Anggota	
9.	Suci Astuti Handayani	Penyusun Laporan Keuangan	Anggota	
10.	Putri Nastiti	Analisis Laporan Keuangan	Anggota	
11.	Lindha Asrie Ati Muktie	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Anggota	
12.	Ferdina Nurbanar Oktaviana	PPNPN Bidang Administrasi	Anggota	

13.	Nanang Sugito	PPNPN Bidang Administrasi	Anggota	
14.	Dominikus Suklema	PPNPN Bidang Pramubakti	Anggota	
15.	Meiyarto Wahyudi	PPNPN Bidang Pramubakti	Anggota	
16.	Suyatno	PPNPN Bidang Pengemudi	Anggota	
17.	Fahrid Dwi Nuryanto	PPNPN Bidang Keamanan	Anggota	
18.	Kristiyanto	PPNPN Bidang Keamanan	Anggota	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA,

ttd.

NOOR HARSYA ARYOSAMODRO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA
Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM



LIA EKAWATI AGUSTINA